**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**CHAIRIDANI PURNAMAWATI**

**NPM: 22911011**



SEKOLAH PASCA SARJANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

MEDAN

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)

Nama : Chairidani Purnamawati

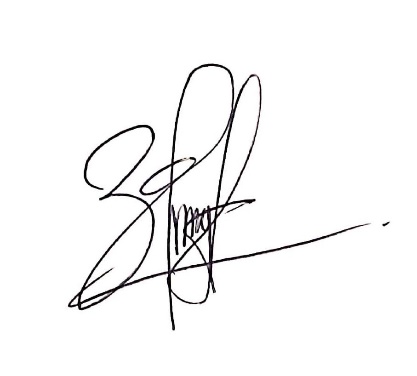
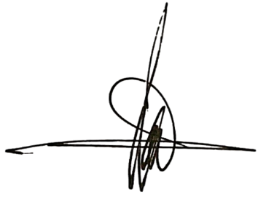
NPM : 22911011

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

****

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H**. **Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN: 0109027604 NIDN : 8952620021**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)

Judul :

Nama : Chairidani Purnamwati

NPM : 22911011

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji

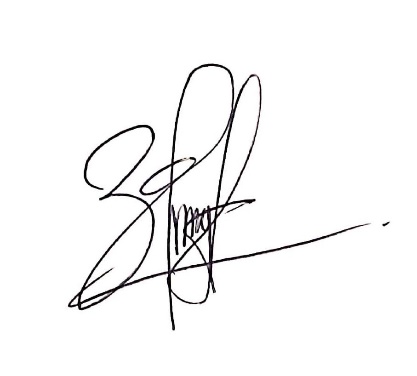
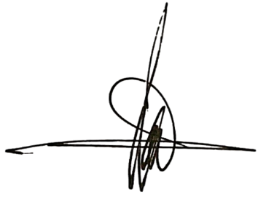
Pada Tanggal 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

****

**Penguji I Penguji II**

**Dr. Azmiati Zuliah S.H., M.H**. **Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN: 0109027604 NIDN : 8952620021**

**Penguji III**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, MH**

**NIDN: 0113028704**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 26 April 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Azmiati, Zuliah, SH, M

2. Dr. Ruslan, SH, MH

3. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairidani Purnamawati

NPM : 22911011

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pura, 11 April 1981

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jln. Sutomo No. 01 Gg. Taqwa

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul ***”*** *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### **Chairidani Purnamawati**

**22911011**

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairidani Purnamawati

NPM : 22911011

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pura, 11 April 1981

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : Jln. Sutomo No. 01 Gg. Taqwa

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

*”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### **Chairidani Purnamwati**

**22911011**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairidani Purnamwati

Alamat : Jln. Sutomo No. 01 Gg. Taqwa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pura, 11 April 1981

Status : Sudah Kawin

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Jenjang Pendidikan

1....

2....

3. .....

4. Universitas Sumater Utara (USU) Tahun 2004

5. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2024

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 26 April 2024

**Chairidani Purnamawati**

**22911011**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

**(STUDI PUTUSAN HAKIM NO 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)**

**ABSTRAKSI**

Chairidani Purnamawati

Prof. Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia, hak asasi manusia (HAM) merupakan alat untuk melindungi setiap anak dari kekerasan, anak yang mengalami kekerasan fisik, perlu mendapatkan keamanan dan juga perlindungan khusus untuk mencegah trauma yang berkelanjutan, salah satunya dengan cara menjauh anak dari pelaku kekerasan itu sendiri.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak?, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban kekerasan fisik?, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.

Bahwa Indonesia telah mengatur tentang hukuman pada pelaku kekerasan fisik terhadap anak yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga telah diatur di Indonesia melalui beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, maka dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

**Kata Kunci : Anak, Pelaku, Kekerasan**

i

**ENFORCEMENT OF LAW AGAINST PERPETRATORS**

**PHYSICAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN**

**(STUDY OF JUDGE'S RULING NO 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)**

ABSTRACTION

Chairidani Purnamawati

Prof. Dr. H. Kusbianto, SH, M. Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

Human rights are owned by every human being, human rights (HAM) are a tool to protect every child from violence, children who experience physical violence need to receive security and also special protection to prevent ongoing trauma, one of which is by keeping children away from perpetrators of violence. itself.

The problems raised in this thesis are: What are the legal regulations governing punishment for perpetrators of physical violence against children? What is the legal protection for children who are victims of physical violence?

The research method used in this research is normative research. legal research that examines written law from various aspects. The nature of this research is descriptive analysis. The data collection technique for this research was carried out using library research methods.

That Indonesia has regulated punishment for perpetrators of physical violence against children, namely: The Criminal Code, Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Laws. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. That legal protection for children as victims of violence has also been regulated in Indonesia through several regulations, namely: The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2014. 2016 concerning Child Protection, Based on Decision Number 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, in cases of physical violence against children, the judge stated that the defendant had been proven to have violated article 80 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law

**Keywords: Children, Perpetrators, Violence**

i

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No 11/Pid.Sus/2022/Pn Gst)”.**

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, terutama sekali kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Kusbianto,S.H., M.Hum, Direktur Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa;

ii

1. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, MH. Kaprodi Program Magister S2 Hukum Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Ruslan, SH, MH. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Terima kasih yang sangat besar dan mendalam saya sampaikan kepada kedua orang tua dan Mertua saya yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Suami dan anak- anak saya tercinta atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan kebersamaan selalu terus menerus disampaikan kepada saya. Juga Kakak, Abang dan Adik2 tersayang;
5. Direktur Eksekutif dan Managemen Yayasan PKPA yang selalu mendukung saya dalam menjalani program paska sarjana ini, juga teman-teman di Kantor Cabang Nias.;
6. Teman-teman seangkatan di Program Studi Pascasarjana S2 Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Gunungsitoli, 26 April 2024

Penulis

**Chairidani Purnamawati**

**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 10
4. Manfaat Penelitian 10
5. Keaslian Penelitian 11
6. Kerangka Teori dan Konsep 13
7. Metode Penelitian 36
8. Jenis Penelitian 38
9. Pendekatan Penelitian 39
10. Sifat Penelitian 40
11. Sumber Data 40
12. Teknik Pengupulan Data 41
13. Analisis Data 42

**BAB II PERATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK 44**

1. Peraturan Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak............................ 44
2. Aturan Hukum Kekerasan Fisik terhadap Anak didalam KUHP …… 45

iii

**BAB III. PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ORBAN**

**KEKERASAN FIFIK…………………………………………….. 55**

1. Hak Anak Sebagai Korban 55
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban 60
3. Peren Pemerintah Dalam Perlindungan Korban 69

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNG SITOLI 92**

1. Kasus Polisi 92
2. Dakwaan Tindak Pidana 94
3. Analisis Putusan 103

**BAB V PENUTUP** 129

1. Kesimpulan 129
2. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA .. 132

# **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia dan hak asasi bagi manusia sangat penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. Hak-hak ini bukan hanya diperuntukan bagi orang dewasa, tapi juga bagi setiap anak tanpa memandang umur, gender, status sosial, agama, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia (HAM) merupakan alat untuk melindungi setiap anak dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.[[1]](#footnote-1) Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri daan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak dapat berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[3]](#footnote-3)

enurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[[4]](#footnote-4) Oleh itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan selain membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.[[5]](#footnote-5)

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.[[6]](#footnote-6) Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”[[7]](#footnote-7)

Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak dapat dilihat pada media massa. Dari segi hukum maupun sosiologi, kasus kekerasan dan tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah sebuah perbuatan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak, yang mana itu semua mengindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan anak.[[8]](#footnote-8)

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[[9]](#footnote-9)

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Untuk itu anak wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.[[10]](#footnote-10)

Salah satu fakta yang mengejutkan seputar perlindungan yang diberikan oleh orangtua kepada anak, adalah angka (kasus kekerasan terhadap anak) yang terlaporkan itu mengalami kenaikan sangat signifikan. Berdasarkan data SIMFONI (Sistem Informasi Online) saja, misalnya, dari 2019, khususnya dari 2021 ke 2022, itu angkanya meledak tinggi," ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, di kantornya di Jakarta, Jumat (27/1/2023). Kasus kekerasan pada anak di Indonesia pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.763 kasus.

Situasi yang sama juga terjadi pada anak-anak di Pulau Nias, berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Advokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kantor Cabang Nias, Tercatat 163 kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi oleh Unit Advokasi PKPA Nias selama 4 tahun terakhir ini, dan 80% pelaku kekerasan tersebut adalah keluarga dari mulai ibu, ayah, kakek, nenek dan saudara kandung.

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Anak yang mengalami kekerasan fisik akan terus merasa takut, cemas, dan tidak aman. Pikiran anak mungkin menjadi selalu waspada dan bertanya-tanya kapan peristiwa kekerasan berikutnya akan terjadi, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Kekerasan sering terjadi pada anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Oleh karena itu, anak yang mengalami kekerasan fisik, perlu mendapatkan keamanan dan juga perlindungan khusus, untuk mencegah trauma yang berkelanjutan, salah satunya dengan cara menjauh anak dari pelaku kekerasan itu sendiri.

Perlindungan khusus terhadap anak adalah Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.[[11]](#footnote-11)

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberi sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Kemudian, dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76C yaitu “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.[[12]](#footnote-12)

Kejahatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dirumuskan dalam pasal 80 yaitu (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Melihat ancaman hukuman yang telah disebutkan secara eksplisit dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas, maka seharusnya hal tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak, tetapi tidak demikian halnya dengan kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid terhadap seorang anak dengan inisial WHKG, memelintir tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mencakar tangan saksi korban dengan menggunakan tangan yang sama selanjutnya mengambil handphone saksi korban tersebut lalu menghapus rekaman video tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores memanjang pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam sepanjang kurang lebih 1 (satu) centi meter dan lebar kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) sentimeter dan pada bagian luar[[13]](#footnote-13) terdapat 3 (tiga) luka lecet bulat masing-masing berdiameter kurang lebih 0,125 (nol koma satu dua lima) sentimeter sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 441/485/VER/VII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah Hulu selaku Dokter UPTD Puskesmas O'O'U Kabupaten Nias Selatan[[14]](#footnote-14), Dimana Jaksa hanya menuntut pidana penjara 6 (enam) terdakwa yang mana hal tersebut jauh dibawah ancaman hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa yang terdapat didalam pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Maka melalui tesis ini, penulis akan mengangkat tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak khususnya untuk kasus penganiayaan yang terdapat dalam putusan Hakim No Perkara: 11/Pid.Sus/2022/PN Gst.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah: **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No Perkara: 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)**

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban kekerasan fisik?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli?

### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak
2. Menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik
3. Menguraikan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

##### **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan dapat dijadikan kerangka dasar bagi penelitian lanjutan di masa mendatang dalam hal memahami dan menerapkan aturan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

##### **Manfaat Praktis**

1. Bagi Akademisi, sebagai sumbangan pemikiran mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan tentang penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.
2. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna merumuskan kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan.
3. Bagi aparat penegak hukum, dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kemampuan personil aparat penegak hukum, dalam menerapkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
4. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sumber informasi ilmiah terkait efektivitas Penerapan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan serta penelitian yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan secara khusus di perpustakaan Universitas Dharmawangsa (UNDHAR), maupun beberapa Universitas Negeri dan Swasta lainnya. penelitian yang menyangkut tentang “**Penegakan Hukum bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak (studi putusan Hakim No Perkara: 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)”** belum pernah dilakukan penelitian baik dengan judul maupun permasalahan yang sama. Namun ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian ini namun jika dilihat dari uraian masalah dan substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Beberapa penelitian tesis yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian Penulis antara lain:

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh : Andi Nur Rahmah B012181064 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020
2. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polres Kudus, Muhammad Zubaidi, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022 dengan rumusan masalah 1, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus? 2, Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus? Dan 3 Apakah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya?
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan) Oleh: Reni Astuti Npm : 2020010011 Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022 dengan rumusan masalah 1.Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua ? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan? 3. Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak ?

### **Kerangka Teori dan Konsepsi**

##### **Kerangka Teori.**

Teori hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukuman yang sama di masa yang akan datang .sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi yang diciptakan oleh para filosof yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk memecahkan permasalahan hukum sehingga oleh karena begitu Tingginya tingkat abstraksinya maka filsafat hukum itu merupakan teori payung atau *Grand* teori.[[15]](#footnote-15)

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.[[16]](#footnote-16)

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. [[17]](#footnote-17)

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa mendatang;
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.[[18]](#footnote-18)

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. [[19]](#footnote-19) M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.[[20]](#footnote-20) Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu:[[21]](#footnote-21)

1. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer);*
2. Hubungan Hukum dengan logika;
3. Metodologi Hukum.

Dari uraian di atas dapat dipaparkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

###### Teori Penegakan Hukum

Dalam kerangka penerapan peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Selanjutnya disebutkan bahwa keinginan-keinginan hukum tersebut merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk hukum yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan. Pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegak hukum melaksanakan tugas sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang dijalankan itu dibuat. [[22]](#footnote-22) .

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan ada tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan Undang-undang yakni lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum yakni polisi, Jaksa dan Hakim, dan *ketiga* adalah unsur lingkungan yang meliputi pribadi, warga negara dan sosial Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[23]](#footnote-23)

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[24]](#footnote-24)

Dalam kerangka proses penegakan hukum tersebut, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi. *Pertama* adalah faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat,* faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelim*a, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi parameter untuk menentukan efektivitas penegakan hukum.[[25]](#footnote-25)

Lawrence M. Friedman mengemukakan keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).[[26]](#footnote-26) Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidak-mauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan dengan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur, substansi dan kultur.[[28]](#footnote-28) Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan berarti hanya menjalankan isi ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kedamaian hidup bersama.

###### Teori Perlindungan

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Philipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[[29]](#footnote-29)

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.[[30]](#footnote-30) Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.[[31]](#footnote-31)

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

###### Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.[[32]](#footnote-32)
2. *Teori Deterrence* (Teori Pencegahan) Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:[[33]](#footnote-33)

*“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.” .*

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan) *treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).[[34]](#footnote-34)
2. Teori ini berkambang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 January 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.[[35]](#footnote-35)

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:[[36]](#footnote-36)

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

1. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:[[37]](#footnote-37)

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

1. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)
2. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
4. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

#### **Konsepsi**

##### Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[[39]](#footnote-39)

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[40]](#footnote-40)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.[[41]](#footnote-41)

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit)*, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)[[42]](#footnote-42)

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana,  penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga dapat berarti suatu upaya yang dilakukan untuk tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan berdasarkan sebagai berikut :[[43]](#footnote-43)

Berdasarkan subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

* dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
* dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan  bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan objeknya atau dari segi hukumnya, penegakan hukum dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

* dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
* dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Selain itu, pengertian tentang penegakan hukum juga dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :**Soerjono Soekanto** berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, **Satjipto Rahardjo**, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, **Jimly Asshiddiqie**, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

##### Pengertian Anak

Anak menurut pengertian Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, adalah setiap manusia di bawah umur delapan belas tahunkecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I Undnag-undang No. 23/2002 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I Undang-undang No.23/2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:[[44]](#footnote-44)

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak.Anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-undang No.23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan. Pengertian dan batasan usia anak dalam UU No. 23 Tahun 2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (every human being) yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 – mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

##### Kekerasan Terhadap Anak

*World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.[[45]](#footnote-45)

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak.

Manurut Straus & Gelles kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Masih menurut Straus dan Gelles kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 1 angka 16 dikatakan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 undang-undang perlindungan anak diatas, maka Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak.

a) Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[[46]](#footnote-46) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.[[47]](#footnote-47) Berdasarkan pasal 6 undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan fisik adalah adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.[[48]](#footnote-48) Berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Penelantaran anak adalah tindakan segaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.[[49]](#footnote-49) Berdasarkan pasal 9 undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikatakan bahwa (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. [[50]](#footnote-50)

d) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang dan pornografi.[[51]](#footnote-51) Berdasarkan pasal 8 undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan seksual: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Lebih lanjut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.

##### Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) [Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)](https://www.erisamdyprayatna.com/2013/10/kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp.html) menyatakan bahwa dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana kepada :

1. Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan dan Orang yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Orang - orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) di atas bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yakni sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana atau biasa disebut dengan *pleger;*
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *doen pleger;*
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *medepleger*; dan
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *uit lokken* (*beschikking*s), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) Hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

### **Metode Penelitian**

Untuk melakukan sebuah penelitian hal yang paling penting adalah metode penelitian. Tidak akan ada penelitian tanpa uraian metodologis tentang bagaimana dan dimana penelitian tersebut dilakukan, dari mana data diperoleh, siapa yang dilibatkan, serta prosedur seperti apa yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang disebutkan pada bagian proposal sebelumnya.

Di dalam metode penelitian terdapat uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[[52]](#footnote-52)

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[[53]](#footnote-53)

Menurut Muhammad Farouq dan Djaali, dijelaskan bahwa penelitian diperlukan guna memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematik yang dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.[[54]](#footnote-54)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam melakukan penelitian hukum ini harus dilakukan dengan cara, metode dan sistematika ilmiah untuk menemukan, memahami, memecahkan, menganalisis dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode hukum tertentu.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.[[55]](#footnote-55)

Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah peraturan hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan lainnya, maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet guna memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak, juga membandingkan antara aturan dalam undang-undang beserta tinjauan umum dari berbagai aspeknya dengan kasus yang terjadi pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli No Perkara: 11/Pid.Sus/2022/PN Gst

Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan.[[56]](#footnote-56) Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara

### **Pendekatan Penelitian**

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[[57]](#footnote-57)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Putusan Hakim PN Gunungsitoli No Perkara: 11/Pid.Sus/2022/PN Gst.

Dalam hal ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 11/Pid.Sus/2022/PN Gst.

### **Sifat Penelitian**

Sedangkan Sifat penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan deskriptif analistis, Deskriptif Analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sering terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.[[58]](#footnote-58) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan sedangkan Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berupa peraturan perundang-undangan maupun produk-produk putusan dan makalah ilmiah lainnya.

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu yang meliputi: Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Putusan-putusan Hakim terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak
2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu putusan, penetapan, buku referensi, jurnal-jurnal, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran,

### **Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* melalui:

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka

1. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita–berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim yang menjadi objek penelitian pada tesis ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN. Gst.

### **Analisis data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. [[59]](#footnote-59) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat dipahami maknanya.

Metode analisis data secara kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[60]](#footnote-60) Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

# **BAB II PERATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

### **A. Peraturan tentang kekerasan fisik terhadap anak**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya piker dan daya rasa. Manusia dicipptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.

Kekerasan terhadap anak diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia baik undang-undang yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

44

Istilah kekerasan terhadap anak hanya dikenal di dalam undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Kekerasan disebut dengan Penganiayaan

### **Aturan hukum kekerasan fisik terhadap anak didalam KUHP**

Sanksi hukum pada pelaku kekerasan terhadap anak didalam KUHP yaitu penganiayaaan dimuat dalam BAB XXII, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP;
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan nya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP sebagai berikut :
   1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
   2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
   3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
   4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
   5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

* + 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
    2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
    3. Kehilangan salah satu panca indra;
    4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
    5. Menderita sakit lumpuh;
    6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
    7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

1. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

* 1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
  2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju ke suatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

1. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

* 1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
  2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja arti direncanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Apabila kita pahami tentang arti dari direncanakan di atas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettielijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

1. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

* 1. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
  2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang Jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat besar;
5. Lumpuh (kelumpuhan);
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

1. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diata tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

##### **Aturan hukum kekerasan fisik terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekerasan terhadap anak juga diatur dalam peraturan yang bersifat *lex spesialis* yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No.35 tahun 2014 pasal 80 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan :

* 1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.[[61]](#footnote-61)

##### **Aturan hukum kekerasan fisik terhadap anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.**

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa faktor penyebab kekerasan pada anak adalah faktor internal yang mana para pelaku kekerasan tersebut adalah orangtua/keluarga dari korban

Didalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[[62]](#footnote-62)

Korban tersebut meliputi :

* 1. suami, istri, dan anak;
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[[63]](#footnote-63)

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga diatur mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak, yang terdapat dalam Pasal 44yaitu:

* 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).[[64]](#footnote-64)

# **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**

# **KEKERASAN FISIK**

### **Hak anak sebagai korban**

Di Dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child* ) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (participation rights). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.[[65]](#footnote-65)

Hak anak secara umum diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.

55

Hak-hak anak sebagai korban diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, Dalam pasal 69 Undang-undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi”.

Selain peraturan diatas, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi. Dalam pasal 2 ayat (2) peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

* 1. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  2. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  3. kemudaratan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[[66]](#footnote-66)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian yang mempunyai tugas khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak, juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Disebutkan dalam pasal 1 peraturan Menteri tersebut yaitu Pasal 1 ayat (1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi: a. pelayanan identifikasi; b. rehabilitasi kesehatan; c. rehabilitasi sosial; d. pemulangan; e. bantuan hukum; dan f. reintegrasi sosial. (2) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 03 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam pasal 10 anak korban penganiayaan memiliki hak-hak sebagai berikut:

* + - 1. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
      2. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
      3. hak menentukan sendiri keputusannya;
      4. hak mendapatkan informasi;
      5. hak atas kerahasiaan identitasnya
      6. hak atas restitusi
      7. hak atas rehabilitasi sosial;
      8. hak atas penanganan pengaduan;
      9. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
      10. hak atas pendampingan.

Didalam pasal 13 Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;

b. hak pelayanan dasar;

c. hak perlindungan yang sama;

d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau

e. hak mendapatkan kebebasan.

Selain itu sebagai korban, anak juga berhak mendapatkan restitusi, ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;

b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yang mana merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya anak yang menjadi korban tindak pidana dapat tetap terpenuhi hak-haknya agar amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

Hak korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan dengan beberapa alasan, yaitu:

* + - 1. Alasan pertama yaitu proses hukum pidana dalam hal ini berhubungan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (Hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya) maksud yang terkandung adalah tuntutan moral dalam wujud hubungan filosofis dalam salah satu pihak dan hubungan sosiologis antara para pihak;
      2. Alasan kedua yaitu adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial, yang mana maksud dari adanya kontrak sosial dan solidaritas sosial adalah Indonesia sebagai negara hukum melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi meskipun itu reaksi sosial dari terjadinya suatu tindak pidana dengan kata lain negara melarang adanya main Hakim sendiri sehingga konsekuensinya apabila ada tindak pidana yang terjadi dan menimbulkan korban maka negara wajib bertanggung jawab terhadap hak para korban; dan
      3. Alasan ketiga yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan sejatinya merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagai penyelesaian konflik.

Dengan terwujudnya penyelesaian konflik maka dapat mendatangkan rasa aman di dalam masyarakat. Anak yang mengalami penganiayaan harus mendapatkan hak-haknya untuk mengembalikan mental, fisiknya untuk sembuh kembali. Anak membutuhkan penanganan berkelanjutan maka anak berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Rumah yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 yaitu:

* + 1. Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan;
    2. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPPA;
    3. Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan;
    4. Ketentuan mengenai penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah/lembaga terkait.

### **Perlindungan hukum bagi korban**

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.[[67]](#footnote-67)

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:[[68]](#footnote-68)

* + 1. Dasar filosofis yaitu Pancasila adalah dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara,dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
    2. Dasar etis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
    3. Dasar yuridis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yang yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Anak yang menjadi korban Penganiayaan perlu diberikan perlindungan hukum Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebiJaksanaan siapa saja (individu atau 59 kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.[[69]](#footnote-69)

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contrario apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.[[70]](#footnote-70)

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung bersifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.

Berdasarkan data kasus Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA Nias).[[71]](#footnote-71)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Anak Korban Kekerasan Di Kota Gunungsitoli | Anak Korban Kekerasan Fisik Di Kota Gunungsitoli |
| 2019 | 13 | 9 |
| 2020 | 6 | 0 |
| 2021 | 47 | 20 |
| 2022 | 22 | 13 |
| 2023 | 19 | 7 |
| **TOTAL** | **107** | **49** |

*Sumber : PKPA Kantor Cabang Nias*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak terhadap anak di Pulau Nias masih terjadi setiap tahunnya.

Undang-undang dalam hal perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Di Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak juga disebutkan beberapa hak anak sebagai korban yaitu pada Pasal 89 Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 90 (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.[[72]](#footnote-72)

Lebih lanjut dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan dalam Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak[[73]](#footnote-73)

Pasal 54 (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.[[74]](#footnote-74)

Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. [[75]](#footnote-75)

Adapun upaya yang dilakukan yaitu: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.[[76]](#footnote-76)

Pasal ke 64 ayat ke (2) lebih rinci menjelaskan upaya apa saja yang harus diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan, yaitu:

1. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.

2. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban maupun keluarga korban tidak di ketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.

3. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

Di Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 16 (1) disebutkan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani, (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.[[77]](#footnote-77)

Pasal 17 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan pada pasal 44 ayat 4 dikatakan bahwa korban kekerasan di lingkungan sekolah berhak mendapatkan pendampingan berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan social dan Rohani; dan/atau layanan pendampingan lain.

### **Peran pemerintah dalam perlindungan korban**

Seperti yang telah dijelaskan pada 20 Undang-undang Nomor No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 23 dikatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Maka penulis kemudian penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Nias dan Nias Selatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Gunungsitoli untuk melihat layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada korban di Pulau Nias.

#### Perlindungan Hukum dari pihak Kepolisian

Di Pulau Nias, terdapat 2 Resor Kepolisian yang menaungi 5 Daerah Otonomi di Pulau Nias, yaitu Polres Nias Selatan untuk wilayah Nias Selatan, dan Polres Nias untuk wilayah Gunungsitoli, Nias, Nias Utara dan Nias Barat.

Di Kedua Polres tersebut, telah terbentuk satu unit khusus yang menangani kasus anak dan Perempuan yaitu Unit PPA Polres Nias Selatan dan Unit PPA Polres Nias.

Mengenai kasus kekerasan terhadap anak Unit PPA Satreskrim Polres Nias dan Nias Selatan bertugas memberikan dan mengupayakan perlindungan bagi korban berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ke 3 menyebutkan: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Penulis melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 dan memperoleh data yang dilaporkan mengenai kekerasan fisik terhadap anak 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023 yang akan penulis uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Nias Selatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instansi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Polres Nias Selatan | 8 Kasus | 6 Kasus | 7 Kasus | 5 Kasus |

*Sumber: Unit PPA Polres Nias Selatan*

Tabel 3. Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Nias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Kota  Gusit | Kab. Nias | Kab. Nisut | Kab. Nisbar | Jumlah Total |
|
| 2019 | 8 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 2020 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 2021 | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 2022 | 15 | 5 | 7 | 1 | 28 |
| 2023 | 26 | 8 | 9 | - | 43 |

*Sumber: Unit PPA Polres Nias*

Data diatas menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh kepolisian tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian bagi anak selaku korban kekerasan, korban wajib mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Unit PPA Polres Nias Peraturan Kepala Kepolisian No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana pasal ke 10 ayat ke (2) terdiri dari:

* 1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
  2. Membuat laporan polisi;
  3. Memberi konseling;
  4. Mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau RS terdekat;
  5. Pelaksanaan penyidikan perkara;
  6. Meminta visum;
  7. Memberi penjelasan kepada korban tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
  8. Menjamin kerahasian info yang diperoleh;
  9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
  10. Menyalurkan korban ke LBH
  11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;

Setelah mendapatkan laporan pihak kepolisian melakukan penyidikan, korban pun diawasi atau diberi pendampingan oleh Dinas PPA, Pekerja sosial atau balai pemasyarakatan jika dibutuhkan. Perlindungan selanjutnya pihak kepolisian menginformasikan mengenai perkembangan kasus kepada keluarga korban atau kepada korban.

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Iskandar Ginting, SHG selaku Kasat Reskrim Prolres Nias mengatakan : “Kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban harus adanya laporan yang dilaporkan langsung setelah itu korban menjelaskan kronologinya jika tidak memungkinkan kepolisian akan mengirim korban ke mitra Polres Nias yang memberikan layanan kepada anak sebagai korban, biasanya kami akan mengkoordinasikan kasus-kasus terhadap anak kepada mitra kami yaitu PKPA Nias, tujuannya adalah agar korban merasa aman dan dapat menjelaskan secara rinci setelah itu kami akan melakukan penyidikan dan memproses kasus korban tersebut, dalam hal korban membutuhkan rumah aman, maka kepolisian akan berkoordinasi dengan PKPA Nias untuk penempatan korban didalam drop in center PKPA Nias”[[78]](#footnote-78)

Lebih lanjut Iskandar Ginting, SH. menjelaskan “apabila korban tidak bisa melaporkan langsung kasusnya, karena korban tidak bisa datang ke polres, atau masyarkat yang melaporkan kasusnya, maka kami akan meminta masyarakat untuk membuat Dumas atau pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolres Nias, dan selanjutnya unit PPA yang akan menindaklanjuti Dumas tersebut dengan memanggil dan memeriksa pembuat dumas, setelah itu polisi akan mengambil Tindakan untuk penyelamatan korban”.

Iskandar Ginting, SH., menyampaikan bahwa pihak polres Nias mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap anak biasanya melalui 3 (tiga) cara, ada yang melalui Laporan langsung, yang dilakukan oleh orangtua korban, ada yang melalui Masyarakat melalui dumas (pengaduan Masyarakat) dan ada yang melalui telpon, kalau kasus dilaporkan melalui telepon, biasanya korbang menghubungi nomor korban Unit SPKT kami yaitu 110, tapi ada juga yang langsung menelpon ke nomor para penyidik, dan setelah mendapatkan telpon, penyidik akan turun kelapangan untuk memastikan kebenaran laporan, dan apabila laporan tersebut benar adanya, maka penyidik akan minta orangtua korban atau Masyarakat menindaklanjuti baik dengan bentuk LP atau bentuk Dumas.

Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Listono, Kanit PPA Polres Nias disampaikan bahwa untuk keamanan dan kenyamanan korban, korban akan diperiksa oleh penyidik anak yaitu penyidik yang sudah tersertifikasi, kemudian korban didampingi oleh Orangtua dan Pekerja Sosial. Lebih lanjut Listono mengatakan bahwa korban akan diperiksa di RPK (ruang pemeriksaan khusus) yang didalamnya difasilitasi dengan AC dan ruang istirahat untuk korban”

#### Perlindungan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli merupakah salah satu daerah otonomi dari 5 daerah otonomi yang berada di Pulau Nias. Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias, dengan dasar pembentukan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa di Kota Gunungsitoli masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran[[79]](#footnote-79), maka sepuluh tahun sejak terbentuknya Kota Gunungsitoli yaitu pada tahun 2018, Pemerintah Kota Gunungsitoli mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yaitu Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Yang mana peraturan daerah tersebut merupakan advokasi dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Cabang Nias (PKPA-Nias) dan kemudian disambut baik oleh legislatif Kota Gunungsitoli, sehingga lahirnya Peraturan Daerah tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Kota Gunungsitoli

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah dengan sosialisasi pencegahan, penyuluhan, kota layak anak di berbagai tempat seperti kelurahan, kecamatan maupun sekolah-sekolah. Sedangkan untuk pengaduan ditangani oleh Unit khusus yaitu UPTD PPA Kota Gunungsitoli

Dalam peraturan daerah tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang peran pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yaitu

Pasal 33 ayat 2

Penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan meliputi:

a. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;

b. Tindakan penyelamatan/penjemputan;

c. Penempatan anak di rumah aman;

d. Rehabilitasi;dan

e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi

Pasal 34

Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;

b. Menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima

mengenai masalah perlindungan anak; dan

c. Mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 35

(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

(2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman.

Pasal 36

(1) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:

a. Keselamatan anak terancam;

b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan

c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/wali dan/atau

masyarakat.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau

hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk

mengasuh dan melindungi anak.

Pasal 37

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Layanan pemulihan kesehatan;

b. Layanan pemulihan sosial dan psikososial; dan

c. Bantuan pendampingan hukum.

Pasal 38

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e meliputi:

a. Penelusuran anggota keluarga;

b. Mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti

dan/atau masyarakat;

c. Fasilitas pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;

d. Dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan

e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

a. Pelayanan gawat darurat;

b. Memberikan visum et repertum atas permintaan atau keterangan polisi;

c. Pelayanan lanjutan berapa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan

medis; dan

d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 40

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 huruf b meliputi;

a. Pendampingan

b. Konseling;

c. Terapi psikososial; dan

d. Bimbingan mental dan spiritual.

Pasal 41

(1) Bantuan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

a. Memastikan anak didampingi oleh penasihat

b. hukum;Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan,

dari mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, persidangan

dan di luar persidangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

Dalam melaksanakan teknis perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gunungsitoli, Pemerintah Kota Gunungsitoli membentuk 1 unit khusus untuk menangani anak korban kekerasan yaitu UPTD PPA Kota Gunungsitoli dibawah dinas P5A (Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) di bawah Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Dasar hukum pembentukan UPTD PPA adalah UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dikatakan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa UPTD PPA terdiri atas UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota.

Maka berdasarkan Amanat tersebut, Pemerintah di Kota Gunungsitoli kemudian membentuk UPTD PPA Kota Gunungsitoli berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Gunungsitoli nomor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/6437/ORG/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Hal Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Gunungsitoli.

Tabel 4. Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di wilayah Kota Gunungsitoli

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Kekerasan | 2020 – 2023 |
| Kekerasan Fisik | 92 Korban |
| Kekerasan Seksual | 29 Korban |
| Kekerasan Psikis | 96 Korban |
| Penelantaran | 85 Korban |

*Sumber: UPTD PPA Kota Gunungsitoli*

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Bapak Yulianus Hia selaku Kepala UPTD PPA Kota Gunungsitoli, mengatakan bahwa: “bahwa dalam menangani anak sebagai korban di Kota Gunungsitoli, UPTD PPA melakukan Upaya-upaya yang bertujuan untuk melindungi anak korban, yaitu menerima laporan baik langsung dari korban maupun dari masyarakat, menerima rujukan dari mitra, melakukan penjemputan korban, memberikan layanan konseling, layanan visum gratis, layanan kesehatan dan layanan rumah aman, karena UPTD PPA tidak memiliki rumah aman, maka korban biasanya kami rujuk ke mitra-mira kami yang memiliki rumah aman di Kota Gunungsitoli ini, contohnya ke PKPA Nias dan ke Panti Asuhan Karya Faomasi, walau pemerintah Kota Gunungsitoli tidak memiliki rumah aman, tetapi kami memiliki dana untuk membiayai korban dalam rumah aman, dana tersebut kami peroleh dari dana DAK[[80]](#footnote-80) Non Fisik dari Pusat”

Lebih lanjut Bapak Yulianus Hia mengatakan “bahwa kami juga memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku dalam hal kasus tersebut adalah kekerasan fisik ringan yang dilakukan oleh orangtua korban, dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan terbaik bagi korban”. Bapak Yulianus Hia juga mengatakan “bahwa dalam proses mediasi, kami biasanya melibatkan pihak kepolisian yang menangani kasus ini, aparat desa korban, Lembaga Masyarakat, Pekerja Sosial dan LK3 Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, untuk meminta pendapat mereka terkait kasus yang sedang dimediasi, sebelum melakukan mediasi, kami biasanya telah melakukan assessment terlebih dahulu untuk mengetahui situasi dan kondis korban dan pelaku”.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban didalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, UPTD PPA Kota Gunungsitoli mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 4 : UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5 : UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. pengaduan masyarakat;
2. penjangkauan korban;
3. pengelolaan kasus;
4. penampungan sementara;
5. mediasi; dan
6. pendampingan korban.

#### **Peran Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban di Kota Gunungsitoli**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang telah bekerja sebagai pekerja sosial di Kota Gunungsitoli sejak tahun 2006, ada beberapa Lembaga Masyarakat yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan di Gunungsitoli yaitu:

* + - 1. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kantor Cabang Nias (PKPA-Nias)
      2. Persatuan Sada Ahmo -Nias (PESADA)
      3. Oseda
      4. Gereja AMIN
      5. Gereja BNKP
      6. Pusat Pengembangan Anak – Kompassion
      7. PATBM

Ke 7 (tujuh) Lembaga Masyarakat tersebut mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban yaitu:

1. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kantor Cabang Nias (PKPA-Nias)

PKPA Kantor Cabang merupakan Lembaga pemerhati anak yang telah ada di pulau Nias sejak tahun 2004, Ketika terjadinya Tsunami dan Gempa di Nias.

PKPA Kantor Cabang Nias mempunyai Unit khusus untuk melayani kasus-kasus anak sebagai korban yaitu Unit Advokasi.

Berdasarkan register unit advokasi PKPA Nias, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PKPA Nias telah mendampingi korban dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 49 Korban

dalam menjalankan layanan terhadap korban, maka para staf berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Unit Advokasi dan Drop in Center PKPA Nias yang telah disusun sejak tahun 2008, dan telah mengalami 3 kali proses amandemen.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Unit Advokasi dan Drop in Center PKPA Nias, maka layanan yang diberikan kepada korban oleh PKPA Nias adalah layanan rehabilitasi, reintegrasi dan Rumah Aman sementara untuk korban.

Selain itu, semua layanan diberikan oleh PKPA Nias kepada korban tidak dipungut biaya dan korban juga mendapatkan dukungan untuk biaya pengobatan, biaya konsumsi selama pemeriksaan di kepolisian, biaya pengambilan Visum et repertum dan biaya perjalanan korban dari rumah ke kantor polisi.

1. Persatuan Sada Ahmo -Nias (PESADA)

Persatuan sada Ahmo-Nias atau Pesada, merupakan Lembaga pemerhati Perempuan yang bekerja di Nias sejak tahun 2005 untuk respon korban Tsunami dan Gempa Nias.

Tidak jauh berbeda dengan PKPA Nias, maka layanan yang diberikan Pesada terhadap korban juga meliputi layanan rehabilitasi, reintegrasi dan Rumah Aman sementara untuk korban dan itu tidak dipungut biaya.

1. Oseda

Oseda merupakan salah satu Lembaga Masyarakat lokal yang baru terbentuk pada tahun 2020, Oseda merupakan Lembaga yang berdiri hasil dari binaan Pesada

Tidak berbeda juga dengan Pesada, Oseda memberikan layanan rehabilitasi, reintegrasi dan rumah aman untuk korban.

1. Rumah Aman Gereja AMIN

Rumah Aman Gereja amin, merupakan rumah aman yang terbentuk pada tahun 2023 melalui advokasi yang dilakukan oleh PKPA Nias dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memberikan layanan kepada anak dan Perempuan sebagai korban. Dan salah satu Lembaga yang mendeklarasikan dirinya untuk terlibat dalam perlindungan korban adalah Gereja Amin dengan menyediakan layanan rumah aman terhadap korban kekerasan baik anak dan Perempuan di Pulau Nias

1. Rumah Aman Gereja BNKP

Tidak berbeda dengan Rumah Aman Gereja amin, maka rumah aman gereja BNKP juga merupakan rumah aman yang terbentuk pada tahun 2023 melalui advokasi yang dilakukan oleh PKPA Nias dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memberikan layanan kepada anak dan Perempuan sebagai korban. Dan salah satu Lembaga yang mendeklarasikan dirinya untuk terlibat dalam perlindungan korban adalah Gereja BNKP dengan menyediakan layanan rumah aman terhadap korban kekerasan baik anak dan Perempuan di Pulau Nias

1. Pusat Pengembangan Anak – Kompassion

Merupakan suatu organisasi berbasis gereja yang merupakan kerjasama dengan suatu lembaga Pelayanan Pengembangan Anak Compassion. Saat ini ada sekitar 30 PPA yang bekerja di Pulau Nias

10 (sepuluh) diantar PPA tersebut, melalui advokasi PKPA Nias mendeklarasikan diri membuka layanan kasus untuk anak sebagai korban meliputi rehabilitasi, reintegrasi dan rumah aman, sedikit berbeda dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Lembaga pemerhati anak di Pulau Nias, maka layanan PPA hanya dikhususkan untuk anak korban yang berasal dari penerima manfaat layanan PPA tersebut.

1. PATBM

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.[[81]](#footnote-81)

Dalam definisi PATBM mengandung beberapa pengertian yaitu: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 tahun 2002). Beranjak dari pengertian perlindungan anak seperti dalam UU Perlindungan Anak tersebut maka pengertian perlindungan anak di dalam pelaksanaan PATBM ini dikerucutkan dengan memberikan fokus pada upaya untuk melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak. Untuk itu pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta UU 23 tahun 2002 & UU 35 tahun 2014 perlindungan Anak

Terpadu adalah pemahaman tentang semua aspek dan komponen dari suatu program atau kegiatan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, dan harus - dalam konteks yang luas - sebagai bagian dari upaya mempromosikan hak-hak anak - serta dianggap sebagai sebuah kontinum, yang berperan sebagai kerangka berpikir utama

Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil yaitu desa/kelurahan).[[82]](#footnote-82)

Tujuan dibentuknya PATBM adalah untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di Masyarakat, untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, PATBM melakukan segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak ;

* 1. Memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan
  2. Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach)
  3. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan

Untuk menanggapi kekerasan terhadap anak di Komunitas, maka aktivitas PATBM melakukan langkah-langkah penanganan meliputi identifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko.[[83]](#footnote-83)

Di Kota Gunungsitoli, telah terbentuk Terbentuknya dua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ( *PATBM* ) di dua lokasi Project PKPA-Nias yang diinisiasi oleh PKPA dan 22 PATBM yang diinisiasi oleh Pemkot Gunungsitoli untuk merespons kasus-kasus terkait anak dan perempuan di tingkat desa.[[84]](#footnote-84)

Dalam merespon kasus-kasus di Desa, maka PATBM bertugas sebagai respon pertama dan selanjutnya PATBM akan merujuk kasus tersebut ke UPTD PPA atau organisasi Masyarakat yang konsen menangani kasus anak di Nias, salah satunya adalah PKPA Nias.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf advokasi PKPA Nias, Bapak Elisman Harefa pada tanggal 27 Februari 2024, bahwa ada satu kasus yang pernah dirujuk oleh salah satu PATBM di Kota Gunungsitoli ke PKPA Nias yaitu kasus pemaksaan pernikahan terhadap seorang anak yang mana anak niat orangtua untuk menikahkan anak tersebut akhirnya dapat diurungkan.

#### **Bentuk Perlindungan Hukum dari Pengadilan**

Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, disebutkan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan kepada anak sebagai korban Ketika mengikuti persidangan, walau secara garis besar undang-undang tersebut mengatur tentang hukum acara persidangan perkara anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi didalam undang-undang itu juga mengatur tentang hukum acara untuk anak sebagai korban dan anak sebagai saksi

Dalam pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[[85]](#footnote-85)

Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 1 ayat (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[[86]](#footnote-86)

Dalam pasal 3 Undang-undang sistem peradilan pidana disebutkan beberapa perlindungan yang harus diberikan oleh Hakim kepada anak sebagai korban Ketika proses persidangan yaitu, anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; anak harus dipisahkan dari orang dewasa; sidang yang tertutup untuk umum; anak tidak boleh dipublikasikan identitasnya; anak mendapatkan pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

Pasal 18 Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.[[87]](#footnote-87)

Pasal 19 (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.[[88]](#footnote-88)

Dalam Pasal 56 untuk melindungi anak korban, Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.[[89]](#footnote-89)

Pasal 58 (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.[[90]](#footnote-90)

Pasal 91 (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

* 1. Bentuk Perlindungan Hukum dari KeJaksaan

Berbagai literatur yang penulis pelajari mengenai bentuk perlindungan hukum dari keJaksaan terhadap anak sebagai korban, penulis tidak menemukan 1 (satu) peraturan pun yang menerangkan secara eksplisit tentang bagaimana keJaksaan dapat turut serta melindungi korban.

Tetapi apabila melihat undang-undang sistem peradilan anak, maka Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan anak sebagai korban, maka demi melindungi anak sebagai korban, Jaksa wajib kerahasiaan identitas anak sebagai korban, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 19 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, masih didalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak juga disebut dalam Pasal 22 Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.[[91]](#footnote-91)

# **BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI.**

## **Kasus Posisi**

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang laki-laki bernama Fauluzisokhi Glawa Alias Ama Astrid yang lahir di Lolomoya tanggal 06 Juli 1989, sehingga saat ini berusia 32 tahun. Terdakwa berkebangsaan Indonesia dan tinggal di Hilizaria Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan dan bekerja sebagai wiraswasta.

Terdakwa didakwa dengan pasal Pasal 60 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang kekerasan fisik terhadap anak.

Adapun yang menjadi korban adalah seorang anak dengan inisial WHKG berumur 10 (sepuluh) tahun yang merupakan tetangga dari Terdakwa. WHKG mendapatkan kekerasan dari terdakwa dengan cara memelintir dan mencakar tangang korban, sehingga menyebabkan luka luka gores memanjang pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam sepanjang kurang lebih 1 (satu) centi meter dan lebar kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) centi meter dan pada bagian luar terdapat 3 (tiga) luka lecet bulat masing-masing berdiameter kurang lebih 0,125 (nol koma satu dua lima) sentimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/485/VER/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah Hulu selaku Dokter UPTD Puskesmas O'O'U Kabupaten Nias Selatan, dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat di tubuh anak korban adalah akibat tekanan dan gesekan benda tumpul

92

Adapun kasus penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16,30 wib, ketika terdakwa Fauluzisokhi Giawa alias Ama Astrid sedang menegur dan memaks-maki orang yang bekerja dikebun miliknya yang bermama MELNI GIAWA alas INA NIA yang tidak lain adalah ibu kandung dari korban WHKG, melihat ibunya dimaki oleh terdakwa, WHKG kemudian merekam perbuatan terdakwa tersebut dengan menggunakan Handphone maliknya, namun karena anak korban merasa takut, anak korban kemudian memberikan handphone miliknya tersebut kepada temannya yang kebetulan saat itu sedang Bersama-sama dengannya pada kejadian itu yaitu dengan inisial KAW untuk melanjutkan perekaman tersebut, kemudian Ketika sedang mereka, istri terdakwa atas nama Likhana Halawa mengetahui perbuatan Korban dan temannya, kemudian berteriak memberitahukan kepada terdakwa, mendengar teriakan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang direkam dan terdakwa langsung menghampiri KAW dan meminta Handphone tersebut sambil menokok kepala KAW, tetapi kemudian KAW berlari sambil membawa Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Korban WHKG, sehingga kemudian korban langsung melarikan diri membawa handphone miliknya tersebut, namun terdakwa berhasil mengejar anak korban lalu menarik dan memelintir tangan sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mencakar tangan anak korban dengan menggunakan tangan yang sama selanjutnya mengambil handphone anak korban tersebut lalu menghapus rekaman video tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka gores memanjang pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam sepanjang kurang lebih 1 (satu) centi meter dan lebar kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) centi meter dan pada bagian luar terdapat 3 (tiga) luka lecet bulat masing-masing berdiameter kurang lebih 0,125 (nol koma satu dua lima) centi meter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/485/VER/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah Hulu selaku Dokter UPTD Puskesmas O'O'U Kabupaten Nias Selatan, dengan kesimpulan bahwa luka yang terdapat di tubuh anak korban adalah akibat tekanan dan gesekan benda tumpul

## **Dakwaan Tindak Pidana**

Dalam menjatuhkan putusan, seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memperberat kesalahan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Hakim untuk membuat keputusan, baik dalam bentuk putusan pemidanaan maupun lainnya. Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP mengatur tentang pertimbangan tersebut. Pasal 197 huruf d memerintahkan agar pertimbangan mengenai fakta, keadaan, dan alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan harus disusun dengan ringkas sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f memerintahkan agar pertimbangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta keadaan yang dapat memperberat atau meringankan kesalahan terdakwa.[[92]](#footnote-92)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman juga mengatur mengenai pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi harus mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa saat memutuskan berat ringannya pidana. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan bukan hanya didasarkan pada logika, akal, dan pengetahuan, melainkan juga harus didasarkan pada kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika, yang disebut sebagai "intuitif irasional". Dengan begitu, putusan yang dihasilkan oleh Hakim dapat dianggap adil.69

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya “saling mengecualikan“. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi “pengganti“ dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*). Karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana di antara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang menjadi dakwaan Jaksa pada kasus ini adalah dakwaan pertama adalah terdakwa melanggar pasal 80 Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan dakwaan Kedua adalah terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 KUHPidana

Karena penuntut umum mendakwa terdakwa dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,

2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid kemuka[[93]](#footnote-93) persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid telah mencakar dan memelintir tangan anak korban Wilam Hasrat Kasih Giawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab Nias Selatan, dengan cara Terdakwa mendatangi Anak saksi Kristian Anugrah Waruwu dan mengetok kepala Anak saksi Kristian Anugrah Waruwu dan meminta Handphone tersebut, lalu Anak saksi Kristian Anugrah Waruwu menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak korban dan Anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa menarik dan memegang tangan kanan Anak korban lalu memelintirnya dan merebut Handphone di tangan Anak korban dan menghapus rekaman Vidio tersebut, sehingga tangan kanan Anak korban mengalami luka gores dan luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/485/VER/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah Hulu selaku Dokter UPTD Puskesmas O'O'U Kabupaten Nias Selatan, dengan kesimpulan bahwa[[94]](#footnote-94) luka yang terdapat di tubuh anak korban adalah akibat tekanan dan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor 1214081105100068 tanggal 12 April 2017 diketahui bahwa Anak Korban WKHG lahir pada tanggal 15 Mei 2011, dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga pada waktu kejadian umur Anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, yang masih dibawah umur dan belum pemah menikah sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;[[95]](#footnote-95)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

* Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya,
* Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lebih ringannya pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum kepada terdakwa dibandingkan dengan ancaman hukuman yang dituliskan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulann, sebab hal tersebut terkesan hanya mengedepankan Formal Justice (*Possitivist-Legalistik*) semata, tanpa memperdulikan Substansial justice dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (*the pure retributivist*) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si “pembuat”, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

* Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya,
* Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

* 1. Menyatakan Terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Analisis Putusan**

Dalam menganalisis putusan nomor : 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, maka penulis mengacu pada tulisan Shidarta, yaitu ***Pertama***, analisis terhadap struktur fakta, yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa fakta yang diangkat oleh Hakim di dalam putusannya itu benar-benar merupakan peristiwa hukum. Analisis struktur fakta juga untuk mengetahui bahwa semua pihak yang terlibat di dalam persidangan kasus itu, khususnya Hakim, tidak keliru dalam menentukan isu utama *(core issue)* dari kasus tersebut. Optik analisis pertama ini sangat berhubungan dengan optik analisis ***kedua***, yaitu analisis terhadap struktur norma hukum yang dijadikan sumber hukum. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih sudah tepat dan memadai. Terlebih-lebih lagi, analisis ini penting untuk mengetahui cara Hakim memaknai norma tadi dengan mencermati subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi norma. Optik analisis ***ketiga*** yang paling penting adalah tentang bagaimana Hakim memberikan pertimbangan hukum. Di sini harus dapat ditunjukkan silogisme yang dibangun oleh Hakim dalam pertimbangannya. Terlepas bahwa silogisme yang baku memang hampir tidak pernah eksplisit dibuat oleh Hakim di dalam putusannya, namun semua uraian pertimbangan di dalam putusan itu dapat diderivasi dan direformulasi menjadi premis-premis dalam silogisme kategoris. Dari sini langsung dapat diketahui apakah Hakim telah melakukan penemuan hukum di luar tafsir gramatikal di dalam pertimbangan putusannya. Juga dapat dikenali apakah terjadi logika kesimpulan melompat *(jumping to conclusion)* atau tidak. Pelaku karakterisasi putusan ternyata banyak yang mengabaikan optik ketiga ini, sehingga karakterisasi tidak cukup mendalam membuat analisis. Pengabaian ini terkadang menghasilkan kekeliruan dalam menentukan kaidah [hukum] yurisprudensi (apabila putusan itu kemudian diberi label sebagai yurisprudensi). Terkadang, yang dianggap kaidah adalah konklusi dari silogisme, padahal seharusnya premis mayor dari silogisme tersebut. Optik berikutnya atau ***keempat*** adalah menganalisis diktum atau amar. Biasanya, para akademisi dan/atau peneliti memberi perhatian pada diktum ini untuk melihat disparitas putusan, yakni apakah antara satu putusan dengan putusan lain dalam perkara-perkara serupa memiliki konsistensi terkait jenis sanksi dan bobot sanksi. Analisis terhadap optik terakhir ini sebenarnya lebih bermain di wilayah diskresioner Hakim, antara lain karena Hakim melihat adanya sejumlah faktor yang meringankan dan memberatkan. Di dalam putusan, biasanya Hakim tidak mengelaborasi faktor-faktor ini yang *notabene* berkonotasi subjektif.[[96]](#footnote-96)

Selain keempat aspek diatas, maka aspek yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim. Selain memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, pertimbangan Hakim harus diambil dengan hati-hati, baik, dan teliti. Jika pertimbangan Hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, baik, dan teliti, maka putusan yang dihasilkan oleh Hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[[97]](#footnote-97)

### Analisis terhadap struktur fakta

Dalam putusan Nomor : 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, beberapa fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yaitu:

* Keterangan saksi-saksi
  + - 1. Wilam Hasrat Kasih Giawa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
* Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban di pegang dengan erat tangan Anak korban dan memelintinya;
* Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan
* Bahwa tangan Anak korban tidak patah pada saat dipegang dan dipelintir oleh Terdakwa;
* Bahwa tangan Anak korban sakit pada saat Terdakwa memegang tangan Anak korban dan memelintimya;
* Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak korban dan memelintirnya karena Anak korban lagi mengvidiokan Terdakwa;
* Bahwa Anak korban mengvidiokan Terdakwa karena memaki-memaki; Bahwa yang dimaki-maki Terdakwa adalah mama sa'a Anak korban yang bernama Melni Giawa Alias Ina Nia;
* Bahwa tidak ada Anak korban minta izin dari Terdakwa pada saat Anak korban mengvidiokan Terdakwa;
* Bahwa kronologis kejadian pada saat itu ketika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Anak korban bersama dengan teman Anak korban yang bernama Kristian Anugrah Waruwu mendatangi tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memaki- maki Melni Giawa Alias Ina Nia, setelah itu Anak korban berinisiatif merekam kejadian tersebut dengan Handphone karena takut dimarahi [[98]](#footnote-98) oleh Terdakwa, lalu teman Anak korban Kristian Anugrah Waruwu mengambil Handphone tersebut untuk melanjutkan mengvidiokan Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban dan teman Anak korban mengvidiokan Terdakwa kemudian Terdakwa tersebut mendatangi teman Anak korban Kristian Anugrah Waruwu dan mengetok kepala teman Anak korban Kristian Anugrah Wanawu dan meminta Handphone tersebut, lalu teman Anak korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak korban dan Anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa menarik dan memegang tangan kanan Anak korban lalu memelintir dan merebut Handphone ditangan Anak korban dan menghapus rekaman Video tersebut lalu Anak korban melaporkan hal tersebut kepada ibu Anak korban dan kemudian ibu Anak korban mengambil Handphone dari tangan Terdakwa;
* Bahwa tangan Anak korban tidak ada luka dan hanya terkelupas kulitnya pada saat dipelintir oleh Terdakwa ;
* Bahwa dua minggu Anak korban tidak sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
* Terhadap keterangan saksi. Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintimya
  + - 1. Kristian Anugrah Waruwu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
* Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dipegang dengan erat tangan anak korban dan memelintirnya;
* Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan;
* Bahwa Anak saksi melihat langsung dan berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memegang tangan anak korban dan memelintimta Bahwa tangan anak korban sakit pada saat dipegang dan dipelintir oleh Terdakwa;
* Bahwa Terdakwa memegang tangan korban dan memelintirnya karena hanya karena mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-maki; [[99]](#footnote-99)
* Bahwa kronologis kejadian pada saat itu ketika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Anak saksi bersama dengan anak korban mendatangi tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memaki-maki Melni Giawa Alias Ina Nia, setelah itu anak korban berinisiatif merekam kejadian tersebut dengan Handphonenya karena takut dimarahi oleh Terdakwa, lalu Anak saksi mengambil Handphone tersebut untuk melanjutkan mengvidiokan Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak saksi dan anak korban mengvidiokan Terdakwa kemudian Terdakwa tersebut mendatangi Anak saksi dan mengetok kepala Anak saksi dan meminta Handphone tersebut, lalu Anak saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada anak korban dan anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa menarik dan memegang tangan kanan korban lalu memelintirnya dan merebut Handphone di tangan korban dan menghapus rekaman Video tersebut lalu anak korban melaporkan hal tersebut kepada ibunya dan kemudian ibunya mengambil Handphone dari tangan Terdakwa;
* Bahwa tangan anak korban tidak ada luka dan yang Anak saksi lihat hanya terkelupas kulitnya pada saat dipelintir oleh Terdakwa;
* Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya;
  + - 1. Minifati Halawa Alias Ina Wilman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
* Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak dari saksi tersebut yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa;
* Bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan;
* Bahwa Terdakwa menegang dan memelintir tangan anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa karena hanya karena anak saksi[[100]](#footnote-100) Wiman Hasrat Kasih Giawa mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki- maki;
* Bahwa milik saksi Handphone yang digunakan oleh anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa untuk mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-maki;
* Bahwa Melni Giawa Alias Ina Nia yang dimaki-maki Terdakwa pada saat itu;
* Bahwa anak saksi pada saat itu dia mengalami demam dan tangannya kesakitan sehingga dua minggu anak saksi tidak sekolah;
* Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya;
  + - 1. Melni Giawa Alias Ina Nia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
* Bahwa yang saksi ketahui dalam dalam perkara ini Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban;
* Bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan tepatnya di depan bengkel Ama Elvi;
* Bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian itu;
* Bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban hanya karena anak korban mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-memaki saksi;
* Bahwa saksi ada berantem mulut dengan Terdakwa pada saat itu;
* Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16. 30 Wib, ketika saksi sedang bertani di kebun milik saksi, kemudian. Terdakwa mencabut ubi jalar di kebun milik saksi dan saksi cekcok mulut dengan Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa memberitahukan bahwa anak korban sedang mengvidiokan cekcok mulut diantara saksi dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban sambil memelintir dan mengambil Handphone yang dipegang oleh anak korban;[[101]](#footnote-101)
* Bahwa anak korban pada saat itu merasakan kesakitan tangannya dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya

* Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa Terdakwa tidak ada memegang dan memelintir tangan anak korban;
* Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar tangan anak korban;
* Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak korban pada saat itu ketika anak korban mengvidiokan Terdakwa ketika cekcok mulut kepada seseorang, Terdakwa mengejar dan merebut tangan Handphone di tangan anak korban dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu kalau saat itu ada Terdakwa memegang, mencakar dan memelintir tangan anak korban;
* Bahwa kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan tepatnya di depan bengkel Ama Elvi;
* Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

### Alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Dalam putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, Hakim tidak menyebutkan apa saja yang menjadi alat bukti dalam kasus ini, maka apabila dianalisis seharusnya Hakim menyebutkan bahwa alat bukti dalam kasus ini adalah bukti Visum et Repertum Nomor: 441/485/VER/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah Hulu selaku Dokter UPTD Puskesmas O'O'U Kabupaten Nias Selatan, yang isinya menerangkan bahwa benar korban mengalami luka gores memanjang pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam sepanjang kurang lebih 1 (satu) centi meter dan lebar kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) sentimeter dan pada bagian luar terdapat 3 (tiga) luka lecet bulat masing-masing berdiameter kurang lebih 0,125 (nol koma satu dua lima) centi meter.

Selain itu alat bukti kedua adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor 1214081105100068 tanggal 12 April 2017 yang menyatakan bahwa korban adalah anak lahir pada tanggal 15 Mei 2011, yang merupakan alat bukti untuk memperkuat dakwan yang disangkakan kepada terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap anak yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

### Analisis terhadap struktur norma hukum yang dijadikan sumber hukum

Dalam putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,

2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

### Analisis pertimbangan hukum

Dalam Putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, yang menjadi analisis pertimbangan hukum adalah:

1. **Dakwaan penuntut umum**

Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan dakwaan terdakwa dengan dakwaan alternatif, **Pertama** adalah terdakwa didakwa telah melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang[[102]](#footnote-102) Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dan **Kedua** adalah Terdakwa didakwa telah melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

1. **Keterangan saksi-saksi, bahwa ada 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Penutut Umum di Persidangan yaitu**
2. Saksi Korban atas nama WHKG yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan, bahwa tangan Anak korban tidak patah pada saat dipegang dan dipelintir oleh Terdakwa, bahwa tangan Anak korban sakit pada saat Terdakwa memegang tangan Anak korban dan memelintimya, bahwa Terdakwa memegang tangan Anak korban dan memelintirnya karena Anak korban lagi mengvidiokan Terdakwa, bahwa Anak korban mengvidiokan Terdakwa karena memaki-memaki, bahwa yang dimaki-maki Terdakwa adalah mama sa'a Anak korban yang bernama Melni Giawa Alias Ina Nia, bahwa tidak ada Anak korban minta izin dari Terdakwa pada saat Anak korban mengvidiokan Terdakwa, bahwa kronologis kejadian pada saat itu ketika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Anak korban bersama dengan teman Anak korban yang bernama Kristian Anugrah Waruwu mendatangi tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memaki- maki Melni Giawa Alias Ina Nia, setelah itu Anak korban berinisiatif merekam kejadian tersebut dengan Handphone karena takut dimarahi [[103]](#footnote-103) oleh Terdakwa, lalu teman Anak korban Kristian Anugrah Waruwu mengambil Handphone tersebut untuk melanjutkan mengvidiokan Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban dan teman Anak korban mengvidiokan Terdakwa kemudian Terdakwa tersebut mendatangi teman Anak korban Kristian Anugrah Waruwu dan mengetok kepala teman Anak korban Kristian Anugrah Wanawu dan meminta Handphone tersebut, lalu teman Anak korban menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak korban dan Anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa menarik dan memegang tangan kanan Anak korban lalu memelintir dan merebut Handphone di tangan Anak korban dan menghapus rekaman Vidio tersebut lalu Anak korban melaporkan hal tersebut kepada ibu Anak korban dan kemudian ibu Anak korban mengambil Handphone dari tangan Terdakwa, bahwa tangan Anak korban tidak ada luka dan hanya terkelupas kulitnya pada saat dipelintir oleh Terdakwa , bahwa dua minggu Anak korban tidak sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap keterangan saksi. Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintimya
3. Kristian Anugrah Waruwu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban di pegang dengan erat tangan anak korban dan memelintirnya, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan, bahwa Anak saksi melihat langsung dan berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memegang tangan anak korban dan memelintirnya, bahwa tangan anak korban sakit pada saat dipegang dan dipelintir oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa memegang tangan korban dan memelintirnya karena hanya karena mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-maki; [[104]](#footnote-104) bahwa kronologis kejadian pada saat itu ketika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Anak saksi bersama dengan anak korban mendatangi tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memaki-maki Melni Giawa Alias Ina Nia, setelah itu anak korban berinisiatif merekam kejadian tersebut dengan Handphonenya karena takut dimarahi oleh Terdakwa, lalu Anak saksi mengambil Handphone tersebut untuk melanjutkan mengvidiokan Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak saksi dan anak korban mengvidiokan Terdakwa kemudian Terdakwa tersebut mendatangi Anak saksi dan mengetok kepala Anak saksi dan meminta Handphone tersebut, lalu Anak saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada anak korban dan anak korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa menarik dan memegang tangan kanan korban lalu memelintirnya dan merebut Handphone di tangan korban dan menghapus rekaman Video tersebut lalu anak korban melaporkan hal tersebut kepada ibunya dan kemudian ibunya mengambil Handphone dari tangan Terdakwa, bahwa tangan anak korban tidak ada luka dan yang Anak saksi lihat hanya terkelupas kulitnya pada saat dipelintir oleh Terdakwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya;
4. Minifati Halawa Alias Ina Wilman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak dari saksi tersebut yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa, bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan, bahwa Terdakwa menegang dan memelintir tangan anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa karena hanya karena anak saksi[[105]](#footnote-105) Wiman Hasrat Kasih Giawa mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki- maki, bahwa milik saksi Handphone yang digunakan oleh anak saksi yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa untuk mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-maki,bahwa Melni Giawa Alias Ina Nia yang dimaki-maki Terdakwa pada saat itu, bahwa anak saksi pada saat itu dia mengalami demam dan tangannya kesakitan sehingga dua minggu anak saksi tidak sekolah, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya;
5. Melni Giawa Alias Ina Nia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa yang saksi ketahui dalam dalam perkara ini Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban, bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban yang bernama Wilman Hasrat Kasih Giawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan tepatnya di depan bengkel Ama Elvi, bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian itu, bahwa Terdakwa memegang dan memelintir tangan anak korban hanya karena anak korban mengvidiokan Terdakwa pada saat memaki-memaki saksi, bahwa saksi ada brantam mulut dengan Terdakwa pada saat itu, bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16. 30 Wib, ketika saksi sedang bertani di kebun milik saksi, kemudian. Terdakwa mencabut ubi jalar di kebun milik saksi dan saksi cekcok mulut dengan Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa memberitahukan bahwa anak korban sedang mengvidiokan cekcok mulut diantara saksi dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengejar anak korban dan menarik tangan kanan anak korban sambil memelintir dan mengambil Handphone yang dipegang oleh anak korban;[[106]](#footnote-106) bahwa anak korban pada saat itu merasakan kesakitan tangannya dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar semua keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa hanya mengambil Handphone ditangan Kristian Anugrah Waruwu dan Terdakwa tidak ada menarik dan memegang tangan Anak korban dan memelintirnya:
6. Keterangan Terdakwa

Dalam putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Gst diterangkan bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak ada memegang dan memelintir tangan anak korban, bahwa Terdakwa tidak ada mencakar tangan anak korban, bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak korban pada saat itu ketika anak korban mengvidiokan Terdakwa ketika cekcok mulut kepada seseorang, Terdakwa mengejar dan merebut tangan Handphone di tangan anak korban dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu kalau saat itu ada Terdakwa memegang, mencakar dan memelintir tangan anak korban, bahwa kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau Kab. Nias Selatan tepatnya di depan bengkel Ama Elvi, bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

1. **Alat bukti yang diajukan ke Persidangan**
2. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Terdakwa cakap bertindak
4. Keadaan yang memberatkan: Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
5. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

### **Analisis diktum atau amar Putusan**

Adapun dalam putusan Nomor: 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, amar putusan Hakim berbunyi

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam amar putusan disebutkan bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan ultra petita (melebihi apa yang dituntut) oleh Penuntut Umum. secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan Hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

M. Yahya Harahap menyebutkan ‘Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*)yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan**.**Pasal 12 ayat (2)[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29)(KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung**(**2015) juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga Hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana.

Meskipun ada kebebasan dan independensi Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi Hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus Hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan.
4. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam persidangan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHAP bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.
5. Begitu juga sebaliknya, Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari tuntutan JPU, bahkan Majelis Hakim dapat memberikan putusan bebas (vrijspraak). Van Bemmelen mengatakan Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas apabila Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran akan perbuatan terdakwa atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut bukan terdakwa yang melakukannya

Mengenai hal tersebut juga disebutkan secara tegas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*asas actore non probante reus absolvitur)*.

Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa sekalipun Jaksa tidak menuntut suatu pasal, Hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang Jaksa telah memasukkan pasal itu ke dalam surat dakwaan. Jika Jaksa tidak memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, tak ada pijakan hukum bagi Hakim untuk menggunakan pasal itu menjerat terdakwa.

1. Perlu dipahami kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu kewenangan Hakim sebagai organ kekuasaan keHakiman adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim dalam menjalankan fungsi keHakiman menganut prinsip “*Freedom of Judge*”, artinya Hakim diberikan “kebebasan” dalam menjatuhkan putusannya. Meski ada kebebasan yang melekat dalam jabatannya, bukan berarti Hakim dapat dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan vonis.
2. Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Dalam konferensi *International Commission of Jurist*, disebutkan juga bahwa kebebasan itu bukan berarti Hakim dapat bertindak sewenang-wenang (*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*). Dalam sistem peradilan Indonesia sendiri, Hakim dalam memberikan putusan harus didasari oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hati nuraninya (vide Pasal 183 KUHAP).

Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya***.**

Jadi seorang Hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:

1. Dari hasil pemeriksaan didepan persidangan;
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa:
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
4. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen).
5. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
6. Oleh karena itu, majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Jadi, rujukan majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354) menuliskan:

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[[107]](#footnote-107)

### Kesimpulan dari analisis putusan Hakim

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan Hakim. Hakim harus memperhatikan pembuktian peristiwa atau fakta yang terjadi dalam persidangan, termasuk lokasi, waktu kejadian, cara pelaku melakukan tindak pidana, akibat dari perbuatan terdakwa, dan apakah terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak termasuk mempertimbangkan bahwa korban adalah anak. Hakim perlu menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang sedang dihadapi untuk membuat pertimbangan yuridis tentang delik yang didakwakan.

Dalam penanganan suatu tindak pidana, memahami dengan jelas jenis tindak pidana yang terjadi adalah penting. Penggelapan bukan termasuk ke dalam kategori kejahatan, namun merupakan tindakan melawan hukum yang berawal dari perbuatan kejahatan. Kekerasan fisik terhadap anak dapat dikenakan hukuman pidana dan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, dibutuhkan Hakim yang berperspektif anak, memahami definisi dan arti kekerasan fisik terhadap anak , akibat kekerasan yang terjadi pada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam menangani kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak.

# **BAB V PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

* + - 1. Bahwa Indonesia telah mengatur tentang hukuman pada pelaku kekerasan fisik terhadap anak yaitu :
         1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, dan Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
         2. Undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
         3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
      2. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga telah diatur di Indonesia melalui beberapa peraturan yaitu:
         1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J
         2. Undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
      3. Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Gst, maka dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang[[108]](#footnote-108) Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dengan amar putusannya:

129

* Menyatakan Terdakwa Fauluzisokhi Giawa Alias Ama Astrid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
* Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
* Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
* Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
* Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  + - * 1. **Saran**

1. Bahwa para aparat penegak hukum harus menerapkan peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

2. Seyogyanya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, seharusnya penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum benar benar mencermati perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga tidak menerapkan pasal pemidanaan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan sebagaimana yang diatur menurut peraturan perundang-undang harus dilaksanakan.

# DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar*, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Editama, Bandung

Dellyana,Shant*. 1988. Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta. Liberty

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,* Liberty, Yogyakarta

Handari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres.

Johnny Ibrahim*, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Jaholden, 2021, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: CV.Pustaka Prima.

Lawrance W. Friedman, dikutip oleh Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Theory Peradilan (Judicial Prucence) termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence),* Kencana, Jakarta.

132

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya.

Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.

Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* bandung, citra Aditya bakti

Muhammad Farouq, dan Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta, PTIK Press.

Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta,* Rineka Cipta.

Maidin gultom, 2010, P*erlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia,*refika Aditama,Bandung

M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Rafika Aditama: Bandung

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Ridwan,2010, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta

Richard West*, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi* Edisi Ke 3, Jakarta : Salemba Humanika.

Ranuhandoo,2013,*Terminologi Hukum,* Grafika, Jakarta.

Ronny HanitijoSoemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta ; Ghalia Indonesia.

Slamet Kurnia. 2013.*Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*

Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang.

Wagiati Sutedjo, 2010, Hukum Pidana Anak, ( Bandung: Refika Aditama)

Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

Satjipto Rahardjo.2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo, 1982, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* , Yogyakarta, Genta publishing.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty).

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Jurnal**

Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang berkeadilan , Artikel pada Jurnal Keadilan* Vol 3 Nomor 6 Tahun 2003/2004

Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali,* Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 03 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018 Nomor 2 No Reg Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor : ( 2 /28 /2018).

Surat Keputusan Wali Kota Gunungsitoli nomor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/6437/ORG/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Hal Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Gunungsitoli

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

**Internet**

Abi Asmana, *Penegakan Hukum (Law Enforcement): Pengertian, Unsur, dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Serta Teori Penegakan Hukum Pidana,* http//:legalstudies71.blogspot.com/2020/08/penegakan-hukum-law-enforcement.html, diakses pada tanggal 08 Februari 2024

Digilib Unila*. BAB II Tinjauan Pustaka.* [BAB II.pdf (unila.ac.id)](https://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf)diakses pada tanggal 08 Februari 2024

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat.*

Edward Silaban, S.S,.M.A. , *Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak*, http://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak, diakses pada tanggal 08 Februari 2024.

1. Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif."* Jurnal Belo 6.1 2020, hal 48-59.

   1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, hal 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993, hal 222. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal 1-2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Angka 15a [↑](#footnote-ref-9)
10. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat*, 2017, hal 27. [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 15 [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235 [↑](#footnote-ref-12)
13. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Gst, hal 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hal 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: CV.Pustaka Prima, 2021, hal 81. [↑](#footnote-ref-15)
16. Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, Jakarta : Salemba Humanika, 2000, hal 49. [↑](#footnote-ref-16)
17. Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres, 2003, hal 39-40. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 121. [↑](#footnote-ref-18)
19. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal 259. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, 2012, hal 30. [↑](#footnote-ref-20)
21. Slamet Kurnia, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, 2013, hal 79. [↑](#footnote-ref-21)
22. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* , Yogyakarta: Genta publishing, 1982, hal 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hal 24 [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal 35. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. Lawrence W. Friedman, dikutip oleh Ahmad Ali, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Theory Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence),* Jakarta: Kencana, 2009, hal 204. [↑](#footnote-ref-26)
27. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal 23 [↑](#footnote-ref-27)
28. Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang berkeadilan , Artikel pada Jurnal Keadilan* Vol 3 Nomor 6 Tahun 2003/2004 [↑](#footnote-ref-28)
29. Satjipto Raharjo, *lmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid* hal 69 [↑](#footnote-ref-30)
31. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hal 118. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2012 hal 41. [↑](#footnote-ref-32)
33. C. Ray Jeffery, hal 72-73. [↑](#footnote-ref-33)
34. Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal 59. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, hlm.70. [↑](#footnote-ref-35)
36. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 11. [↑](#footnote-ref-36)
37. Zainal Abidin, *op.cit*, hal 11 [↑](#footnote-ref-37)
38. Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,* Yogyakarta: Liberty, hal 47. [↑](#footnote-ref-38)
39. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar*, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Bandung: Refika Editama, 2008, hal. 87 [↑](#footnote-ref-39)
40. Dellyana,Shant*, Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32 [↑](#footnote-ref-40)
41. Digilib Unila*. BAB II Tinjauan Pustaka.* [BAB II.pdf (unila.ac.id)](https://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf)diakses pada tanggal 08 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-41)
42. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal 160. [↑](#footnote-ref-42)
43. Abi Asmana, *Penegakan Hukum (Law Eforcement): Pengertian, Unsur, dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Serta Teori Penegakan Hukum Pidana,* http//:legalstudies71.blogspot.com/2020/08/penegakan-hukum-law-enforcement.html, diakses pada tanggal 08 Februari 2024 pukul 14.38 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ridwan, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 34. [↑](#footnote-ref-44)
45. Edward Silaban, S.S,.M.A. , *Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak*, http:// ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak, diakses pada tanggal 08 Februari 2024, pukul 14.46 [↑](#footnote-ref-45)
46. Kekerasan Terhadap anak [Pengertian Kekerasan Terhadap Anak menurut Undang-Undang – Paralegal.id](https://paralegal.id/pengertian/kekerasan-terhadap-anak/) diakses pada tanggal 06 Maret 2024, pukul 19:39 [↑](#footnote-ref-46)
47. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, hal 15. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid,* hal 16. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid,* hal 16. [↑](#footnote-ref-49)
50. Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 9. [↑](#footnote-ref-50)
51. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, hal 16. [↑](#footnote-ref-51)
52. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal 43 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, hal 32 [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Farouq, dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PTIK Press, 2005, hal 1. [↑](#footnote-ref-54)
55. Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung: citra Aditya bakti, hal 101. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ranuhandoo, *Terminologi Hukum,* Jakarta: Grafika, 2013, hal 419. [↑](#footnote-ref-56)
57. Johnny Ibrahim*, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hal 300. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi PenelitianHukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 9. [↑](#footnote-ref-58)
59. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal 103. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*, hal 104. [↑](#footnote-ref-60)
61. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid,*  pasal 1 angka 3 [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid,* pasal 2 ayat 1-3 [↑](#footnote-ref-63)
64. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1-3 [↑](#footnote-ref-64)
65. Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual Di Provinsi Bali,* Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1, hal 24. [↑](#footnote-ref-65)
66. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi, Pasal 2 [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid,* hal.78 [↑](#footnote-ref-67)
68. Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia,* Bandung: refika Aditama, 2010, hal 37. [↑](#footnote-ref-68)
69. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hal. 35 [↑](#footnote-ref-69)
70. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Malang: Setara Press, 2017, hal 76. [↑](#footnote-ref-70)
71. Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja menangani kasus di Pulau Nias [↑](#footnote-ref-71)
72. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pasal 89 [↑](#footnote-ref-72)
73. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 29 [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid*, pasal 54 [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid*, pasal 59 ayat 2 huruf i [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*, pasal 69 [↑](#footnote-ref-76)
77. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekersan dalam rumah tangga pasal 16 [↑](#footnote-ref-77)
78. Rumah aman miliki PKPA Kantor Cabang Nias, yang berfungsi sebagai rumah aman sementara bagi anak dan Perempuan korban kekerasan di Pulau Nias. [↑](#footnote-ref-78)
79. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Kota Gunungsitoli tentang penyelenggaraan perlindungan anak, point b bagian menimbang. [↑](#footnote-ref-79)
80. Dana DAK No Fisik adalah Bagian Dari Belanja Negara Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kepada Daerah Dan Desa Dalam Rangka Mendanai Pelaksanaan Urusan Yang Telah Diserahkan Kepada Daerah Dan Desa**.** [↑](#footnote-ref-80)
81. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarkat (PATBM) hal 3. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid* [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid,* hal 3-4. [↑](#footnote-ref-83)
84. Laporan tahunan Manager Kantor Cabang Nias 2023. [↑](#footnote-ref-84)
85. Undang-undang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 ayat (1) [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid*, pasal 1 ayat (2) [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid,* pasal 18 [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid*, pasal 19 [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid,* pasal 56 [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid,* pasal 58 [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid,* pasal 22 [↑](#footnote-ref-91)
92. Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”*, Kanun Jurnal Ilmu [↑](#footnote-ref-92)
93. Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst [↑](#footnote-ref-93)
94. Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst, hal 11 [↑](#footnote-ref-94)
95. Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst [↑](#footnote-ref-95)
96. # Shidarta, *Model Dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim,* [*model Dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim* (Binus.Ac.Id)](https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasi-putusan-hakim/)Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2024, Pukul 06:09

    [↑](#footnote-ref-96)
97. Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140. [↑](#footnote-ref-97)
98. Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN. Gst [↑](#footnote-ref-98)
99. Putusan Nomor 11Pd Sus/0022/PN.Gst Hal 6 [↑](#footnote-ref-99)
100. Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst hal 7 [↑](#footnote-ref-100)
101. Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst hal 8 [↑](#footnote-ref-101)
102. Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gat [↑](#footnote-ref-102)
103. Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN. Gst [↑](#footnote-ref-103)
104. Putusan Nomor 11Pd Sus/0022/PN.Gst hal 6 [↑](#footnote-ref-104)
105. Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst hal 7 [↑](#footnote-ref-105)
106. Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gst [↑](#footnote-ref-106)
107. [Apakah Hakim Boleh Memutus Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Pidana ? – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” (lawyersclubs.com)](https://www.lawyersclubs.com/apakah-hakim-boleh-memutus-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa-penuntut-umum-jpu-dalam-perkara-pidana/) diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 22:41 [↑](#footnote-ref-107)
108. Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Gat [↑](#footnote-ref-108)